



Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Program Sembako Di Kabupaten Sukabumi

Siti Nuraeni ¹⁾; Ike Rachmawati ²⁾; Tuah Nur³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: ¹⁾ sitinuraeni082@ummi.ac.id; ²⁾ ike_rachmawati@yahoo.com; ³⁾ tuahn309@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [30 April 2022]

Revised [29 Mei 2022]

Accepted [18 Juni 2022]

KEYWORDS

Role, Program, Basic Food Program, Poverty

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Program sembako merupakan salah satu program yang diluncurkan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah seperti: 1) kurangnya ketelitian fasilitator dalam menginput data; 2) kurangnya sosialisasi program sembako kepada KPM; 3) Kualitas pangan yang diberikan kurang layak; serta 4) Tidak adanya Sebagian data rekapan saldo kosong yang dialami KPM. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam penyaluran program sembako di Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *snowball sampling*. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero (2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam penyaluran program sembako di Kabupaten Sukabumi sudah dilakukan dengan cukup baik jika dilihat dari peran memfasilitasi, representasi, dan teknis. Namun, dalam peran mendidik yang telah dilakukan belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari masih minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat umum dan KPM.

ABSTRACT

Basic food program is a program which has released by the government to tackle poverty. But in implementation of basic food program there are still some problem, such as: 1) less careful from fasilitator in inputing data; 2) less socialization about basic food program to KPM; 3) quality of food is not suitable; and 4) there are not some recapitulation data about empty balace which has experienced by KPM. The purpose of this research is to know the role of social service in distributing basic food program in the Sukabumi District. In this research the writer used qualitative descriptive research. And snow ball sampling technique is used to determine informant. While in this research the writer used observation, interview, and documentation technique to collect the data. Role theory is used in this research by Jim Ife and Frank Tesoriero (2016). The result of this research shows that the role of social service in distributing basic food program in Sukabumi District has been carried out well when viewed from the facilitating representation and technique role. But in the role of educating, it has not been maximized. This can be seen from the lack of information obtained by the public and KPM.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Sukabumi. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi mencatat adanya kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Sukabumi. Berikut ini tabel jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2015-2020 menurut data BPS Kabupaten Sukabumi.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Presentase(%)
2015	217,9	8,96%
2016	198,7	8,13%
2017	197,1	8,04%
2018	166,3	6,76%
2019	153,3	6,22%
2020	175,1	7,09%

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, 2021

Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan. Penurunan angka kemiskinan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui beberapa program yang sudah diluncurkan. Sementara itu, presentase kemiskinan naik dari 6,22% pada tahun 2019 menjadi 7,09% pada tahun 2020. Dalam

menurunkan angka kemiskinan, peran pemerintah sangat penting mengingat kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi acuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan berbagai program bantuan. Salah satunya yakni program sembako.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya dapat mengambil bantuan tersebut dalam bentuk bahan pangan yang meliputi: sumber karbohidrat (beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu), sumber protein hewani (telur, daging sapi, ayam, ikan), sumber protein nabati (kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu), serta sumber vitamin dan mineral (sayur-mayur, buah-buahan). Besaran manfaat dari program bantuan ini yakni sebanyak Rp.200.000/KPM/bulan. Selanjutnya, pengambilan bantuan dilakukan dengan cara menukarkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada e-warong yang merupakan agen penyedia bahan pangan dalam penyaluran program sembako. Adapun jumlah penerima bantuan program sembako di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2021 sebanyak 238.729 KPM yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Banyaknya penerima bantuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin.

Namun berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, dalam pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Sukabumi tersebut masih terdapat beberapa masalah, yaitu:

- 1) Kurangnya ketelitian fasilitator dalam menginput data. Kurangnya ketelitian fasilitator dalam penginputan data seperti NIK, menyebabkan adanya sebagian saldo KPM kosong sehingga KPM tidak bisa mencairkan bantuan tersebut. Menurut data Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, tercatat pada bulan Oktober 2021 total jumlah KPM yang mengalami saldo kosong sebanyak 25.684 KPM yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi.
- 2) Kurangnya sosialisasi program sembako kepada KPM. Kurangnya sosialisasi program sembako yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Program Sembako kepada KPM menyebabkan KPM tidak memahami program tersebut. Seperti tidak mengetahui bagaimana alur pengajuan dan penggantian KPM dan prosedur pergantian kartu yang rusak/hilang/terblokir.
- 3) Kualitas pangan yang diberikan kurang layak. Seperti yang terjadi di Kecamatan Lengkon, sebagian beras dan daging ayam yang diberikan tak layak konsumsi. Sebagian daging ayam tersebut sudah mulai busuk dan mengeluarkan bau. Tidak hanya di Lengkon, hal tersebut juga terjadi di Kecamatan Jampang Tengah yakni daging ayam yang diterima dalam kondisi sudah mulai membusuk. Berikut ini dapat dilihat kondisi daging ayam dan beras yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi.

Gambar 1. Kondisi Daging Ayam dan Beras yang Tak Layak Konsumsi



Sumber: Sukabumiupdate.com, 2021

Uraian permasalahan diatas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako. Hal tersebut dijelaskan pada Bab 1 Pasal 2 poin c, bahwa "Program Sembako bertujuan untuk memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi." (Permensos No 5 Tahun 2021)

- 4) Tidak adanya sebagian data rekapan saldo kosong yang dialami KPM. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, pihak Dinas Sosial hanya memiliki rekapan jumlah KPM yang saldonya kosong pada bulan Oktober 2021 saja, sementara bulan-bulan lainnya tidak ada. Padahal dalam Pedoman Umum Program Sembako 2020 (2019:101) seharusnya pelaporan rekapan data salur program sembako dilakukan perbulan, triwulan, atau persemester.

Peran Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi sangat penting dalam keberhasilan penyaluran Program Sembako. Tanpa adanya peran Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi tentunya pelaksanaan dan penyaluran program sembako tidak akan berjalan dengan lancar. Mengingat Dinas Sosial memiliki peranan penting dalam pelaksanaan program tersebut yakni sebagai Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten yang menjadi pelaksana penyaluran program sembako di Kabupaten Sukabumi.



LANDASAN TEORI

Peran

Menurut Soekanto (2002:243), “peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.” Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sementara menurut Rivai (2004:148) “peranan dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.” Sedangkan menurut Poerwodarminta (1995: 571) “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Selanjutnya, Jim Ife & Frank Tesoriero (2016:558-614) menyatakan bahwa: “Berbagai peran *community worker* telah dikelompokkan ke dalam empat golongan, yakni peran memfasilitasi (*facilitative roles*), peran mendidik (*educational roles*), peran representasi (*representational roles*) dan peran teknis (*technical roles*).” Dari uraian tersebut peran dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan fungsi, tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Program

Menurut Arikunto dan Jabar (2009:3), “pengertian secara umum program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan.” Selanjutnya menurut Arikunto (1988:1) yang mendefinisikan bahwa “program merupakan sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” Pengertian program tersebut sejalan dengan pemahaman program yang dikemukakan oleh Widoyoko (2013) bahwa: “Program diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan seksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang.” Dari berbagai definisi program diatas, dapat kita pahami bahwa program dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa organisasi pemerintah yang bekerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Program Sembako

Dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Program Sembako 2020 (2019:10) dijelaskan bahwa: “Program Sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan non tunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.” Salah satu tujuan dari program sembako ini untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.

Kemiskinan

Menurut Sajogyo dalam Frederic (2018: 38), “Kemiskinan merupakan dimana seseorang hidup di bawah standar kebutuhan minimum yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pangan yang membuat seseorang cukup untuk bekerja dan hidup sehat berdasarkan kebutuhan beras dan gizi. Seseorang dikatakan miskin apabila tidak memperoleh penghasilan setara dengan 320 kilo gram beras untuk daerah pedesaan, dan 480 kilo gram beras untuk masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan.” Sementara menurut Badan Pusat Statistik (BPS), untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi BPS mendefinisikan “Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Adapun penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *snowball sampling*. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, validasi data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan teknik. Peneliti tidak menggunakan triangulasi waktu karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data menurut Miles & Huberman yang meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahapan ini, peneliti mendeskripsikan hasil penelitian mengenai peran Dinas Sosial dalam penyaluran program sembako di Kabupaten Sukabumi dengan berdasarkan teori peran *community worker* menurut Jim Ife & Frank Tesoriero (2016) yaitu: 1) Peran Memfasilitasi (*Facilitative Roles*); 2) Peran Mendidik (*Educational Roles*); 3) Peran Representasi (*Representational Roles*); dan 4) Peran Teknis (*Technical Roles*).

1. Peran Memfasilitasi (*Facilitative Roles*)

Dalam hal ini, Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi memiliki peran memfasilitasi dalam pelaksanaan penyaluran program sembako di Kabupaten Sukabumi. Agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar. Berbagai cara telah dilakukan oleh Dinas Sosial untuk menunjang pelaksanaan program sembako yakni diantaranya dengan cara melakukan penginputan data, pemutakhiran data, mengadakan pertemuan/rapat koordinasi, menyediakan sarana dan prasarana dalam suatu pertemuan, serta penanganan pengaduan.

Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi menggunakan aplikasi SIKS-NG (Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation) dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator yakni menginput dan memperbaiki data KPM. Dengan adanya aplikasi tersebut, mereka mendapatkan kemudahan dalam menginput data secara online. Melalui aplikasi tersebut Dinas Sosial melakukan penginputan dan pemutakhiran data. Dinas Sosial juga mengadakan pertemuan bersama pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program sembako seperti rapat koordinasi yang dilaksanakan pada bulan february 2022. Rapat tersebut dihadiri oleh para pelaksana program sembako di Kabupaten Sukabumi. Dalam rapat tersebut membahas terkait kondisi KPM, E-Warong, dan pelaksanaan penyaluran program sembako yang harus sesuai dengan pedoman umum program sembako. Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Salah satu contoh sarana dan prasarana tersebut yaitu ruangan, pengeras suara, layar, proyektor, kursi, meja, dan fasilitas lainnya.

Selain itu, Dinas Sosial juga menerima dan menangani keluhan yang diajukan oleh pihak kecamatan, bahkan masyarakat. Sejauh ini ada berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat diantaranya seperti masalah bantuan tidak cair karena saldo kosong, ingin mengajukan bantuan, kesalahan data, perbaruan data, dan sebagainya. Keluhan-keluhan tersebut akan ditangani oleh pihak dinas sehingga tidak ada KPM atau pun masyarakat yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, tanpa adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak dinas baik berbentuk jasa, tempat ataupun barang, pelaksanaan program sembako tidak akan berjalan lancar.

2. Peran Mendidik (*Educational Roles*)

Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi memiliki peran memberikan pemahaman terkait pelaksanaan program sembako kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut. Adapun bentuk pemberian informasi tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu dengan cara sosialisasi melalui pertemuan langsung, surat edaran dan media online seperti pesan whatsapp. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi bersama para pelaksana program sembako lainnya melakukan sosialisasi program sembako secara bertemu langsung pada bulan Februari 2022.

Namun, sosialisasi melalui pertemuan langsung hanya dapat teraksana sebanyak dua kali pertemuan dalam satu tahun. Hal tersebut terjadi karena terkendala biaya yang lebih diprioritaskan untuk penanganan kasus covid-19 yang terjadi beberapa tahun ini. Berdasarkan hasil wawancara, informasi terkait program sembako yang didapatkan oleh masyarakat sangat minim. Contohnya mereka hanya mengetahui bahan pangan apa saja yang didapatkan, pengaduan keluhan, dan pengajuan bantuan. Padahal masih ada informasi lainnya yang belum mereka dapatkan terkait program sembako yang tertera dalam pedoman umum seperti kebijakan, tujuan, prinsip dan mekanisme pelaksanaan, pengaduan, serta pemenuhan gizi.

3. Peran Representasi (*Representational Roles*)

Dalam hal ini, Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi memiliki peran untuk mewakili berbagai kepentingan masyarakat/KPM dalam menangani masalah yang mereka alami dalam penyaluran program sembako. Adapun masalah yang sering dialami oleh KPM dalam penyaluran program sembako ini diantaranya: saldo KPM yang kosong sehingga bantuan tidak bisa dicairkan, distribusi bantuan yang kadang terlambat, dan kualitas bahan pangan yang kurang sesuai harapan. Namun masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan melakukan pengaduan kepada pendamping desa/kecamatan atau pun langsung kepada Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Semua pengaduan keluhan tersebut nantinya akan di proses oleh pihak dinas, sehingga KPM tidak merasa dirugikan



karena adanya masalah-masalah tersebut. Sejauh ini Dinas Sosial cukup responsif dalam menerima dan mengatasi berbagai masalah yang dialami oleh KPM.

4. Peran Teknis (*Technical Roles*).

Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi memiliki peran untuk memantau proses pelaksanaan penyaluran program sembako secara teknis di lapangan. Mereka juga harus memastikan bahwa proses pelaksanaan penyaluran program sembako ini sesuai dengan pedoman umum program sembako 2020. Kegiatan pemantauan oleh pihak Dinas Sosial pada saat proses penyaluran bantuan program sembako di lapangan dilakukan dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan ke kecamatan maupun desa.

Pada saat monitoring dan evaluasi dilakukan, nantinya pendamping sosial kecamatan/desa harus melaporkan terkait pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut seperti rekapan jumlah KPM yang berhasil mencairkan bantuannya dan juga KPM yang mengalami saldo kosong atau KPM yang gagal mencairkan bantuannya. Namun pada kenyataannya menurut staf administrasi program sembako Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, tenaga pendamping kecamatan tidak mengirimkan pelaporan rekapan penyaluran setiap bulan. Seperti pada tahun 2021, pelaporan rekapan pelaksanaan penyaluran program bantuan hanya ada rekapan untuk bulan Oktober 2021 saja. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kerja sama antara Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dengan tenaga pendamping kecamatan/desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Peran memfasilitasi dalam pelaksanaan penyaluran program sembako sudah dilakukan dengan cukup baik oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Adapun beberapa bentuk peran memfasilitasi yang telah dilakukan yaitu melakukan penginputan data, pemutakhiran data, mengadakan pertemuan/rapat koordinasi, menyediakan sarana dan prasarana dalam suatu pertemuan, serta penanganan pengaduan.
2. Peran mendidik yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi sebagai Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Sukabumi belum maksimal. Para pelaksana memang sudah melakukan tugasnya dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran program sembako yakni pendamping sosial kecamatan/desa, masyarakat umum dan KPM. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat beberapa kendala seperti terbatasnya anggaran dan pembatasan aktivitas yang diakibatkan adanya pandemic covid-19, sehingga sosialisasi yang dilakukan belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari masih minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat umum dan KPM.
3. Peran representasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dalam penyaluran program sembako ini sudah cukup baik. Terlihat dari sikap mereka dalam menerima dan mengatasi berbagai masalah yang dialami oleh KPM. Hal tersebut merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dalam rangka mewakili masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan dan haknya.
4. Peran teknis yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi sudah dilakukan dengan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial pada saat proses penyaluran bantuan program sembako di lapangan yakni dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi ke kecamatan maupun desa. Namun, masih perlu adanya peningkatan kerja sama antara Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dengan tenaga pendamping kecamatan agar pelaporan kegiatan pelaksanaan penyaluran program bantuan tersusun dengan baik.

Saran

Dalam rangka pembaharuan penelitian dan memperluas kajian keilmuan mengenai peran Dinas Sosial dalam penyaluran program sembako, maka diharapkan penelitian selanjutnya agar menggunakan teori peran yang lain. Hal tersebut dilakukan untuk pengembangan keilmuan mengenai topik penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 1988. *Penilaian Program Pendidikan*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Cet XII*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi dan Jabar. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. Kemiskinan. <https://sukabumikab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html> (Diakses pada 22 Desember 2021)
- Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. 2021. Data Salur Program Sembako Kabupaten Sukabumi.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2016. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Edisi 3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poerwodarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukabumiupdate.com. 2021. Beras dan Daging BPNT di Sukabumi Tak Layak Konsumsi, Dinsos: Jangan Terima. <https://sukabumiupdate.com/posts/92446/beras-dan-daging-bpnt-di-sukabumi-tak-layak-konsumsi-dinsos-jangan-terima> (Diakses pada 18 November 2021)
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai. 2019. *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Jakarta.
- Widoyoko, Eko Putro. 2013. *Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar.